

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN
TIDAK MENYENANGKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks)



OLEH :

MUHAMMAD ADYATMA WILDAN PRANOTO

B111 10 380

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN
TIDAK MENYENANGKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks)

OLEH

MUHAMMAD ADYATMA WILDAN PRANOTO
B111 10 380

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 81/PID.B/2013/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ADYATMA WILDAN PRANOTO

B11110380

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 25 Agustus 2014
Dan Dinyatakan Diterima

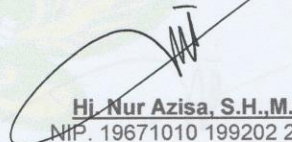
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Dekan,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

NAMA : MUHAMMAD ADYATMA WILDAN PRANOTO

NOMOR POKOK : B111 10 380

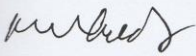
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor. 81/Pid.B/2013/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar skripsi.

Makassar, juni 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhadar, S.H.M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002



Hj Nur Azisa, S.H.M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

23 Juni
2014

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

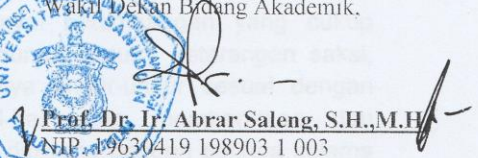
Nam : **MUH. ADYATMA W. P.**
No. Pokok : B111 10 380
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan
(Studi Kasus Putusan No.81/Pid.B/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2014

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,




Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MUHAMMAD ADYATMA WILDAN PRANOTO (B 111 10 380), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 81/PID.B/2013/PN.Mks), di bawah bimbingan **Muhadar**, sebagai pembimbing I dan **Nur Azisa**, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan hakim nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam putusan hakim dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam putusan nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks.

Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulis skripsi ini. Semua unsur perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa Yossy Tungawan telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini terlihat dari terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut sesuai dengan pasal yang didakwakan pada terdakwa. Dalam memutuskan perkara Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempunyai pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu terdakwa dipidana dengan penjara selama 2(dua) bulan dan membayar biaya perkara.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin atas segala nikmat iman, islam dan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga atas daya dan kuasanya yang selalu tercurahkan dari-Nya serta ketabahan dan keikhlasan pada diri saya yang termotivasi untuk selalu berusaha menyelesaikan studi strata 1(satu) di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan tak lupa pula, salam dan sholawat untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, nabi Akhir Zaman, serta para sahabat-sahabat dan keluarganya yang selalu menjunjung nilai-nilai islam di atas permukaan bumi persada ini. Semoga sampai diakhir masa kemahasiswaan, Penulis tetap berada dibawah naungan cahaya ilahi, memberikan petunjuk dan khsanah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh hikmah dan bijaksana.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga dengan hasil karya ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi pada diri pribadi penulis untuk mengembangkan wawasan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis atas hasil karya tulis ini.

Untuk itu, terimakasih saya haturkan tiada hentinya dan doa kasih sayang kepada kedua orang tua saya ayahanda H.Daru Pranoto dan ibunda tercinta Hj.Lily Wahliyati sebagai wujud terimakasih dan rasa kasih sayang padanya atas bimbingan, perhatian, kasih sayang, dan pengorbanan serta jasa-jasanya, serta support dari saudara-saudaraku

Muh.Yogi WP, Muh Fadlan WP, Anggy Nur Adhini, Mulka Nur Mustika, Muh Huda WP, Muh Zheyd WP, yang tak mungkin bisa untuk terucapkan sehingga penulis mampu berpijak dan menjadi manusia seperti sekarang ini. Selain itu saya haturkan pula terima kasih kepada Bapak **Prof.Dr.Muhadar,S.H,M.S.** sebagai pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Azisa,S.H,M.H.** sebagai pembimbing II, atas segala arahan dan bimbingannya yang penuh kearifan dan bijaksana membimbing penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa-jasa dan budi baik sehingga penulis tidak merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada:

- 1..Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh jajarannya yang telah membantu dan menyediakan berbagai fasilitas pendukung penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta seluruh Dosen pengasuh mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu hukum berdasarkan bidangnya.
- 2.. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Muh Said Karim, S.H., M.H, dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, serta Dr. Dara Indrawaty, S.H., M.H. selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
- 3.. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung untuk skripsi ini.

4. . Sahabat-sahabatku dari Hasanuddin Law Sudy Center, Legitimasi, dan dari A2KT, yang telah memberi dukungan dalam kebersamaan, memberikan motivasi dan pengajaran yang berarti dalam menjajaki kehidupan nyata dan mengingatkanku kepada fitra manusia sebagaimana mestinya.

5. . Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya teman-teman Notaris Angkatan 2010.

Akhir kata Penulis hanya dapat berharap semoga dengan skripsi ini dapat memberikan pengajaran kepada kita semua dan memberikan makna positif bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum, Amin.

Makassar, Agustus 2014

Penulis

Muhammad Adyatma W.P

DAFTAR ISI

	halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Yuridis.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pidana	12
1. Pengertian Pidana.....	12
2. Jenis-Jenis Pidana	13
3. Teori Tujuan Pemidanaan	19
C. Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan	24
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Putusan Hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks)	36
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks)	44
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di era pasca runtuhnya rezim orde baru, pemerintah Indonesia dituntut agar dalam setiap pengambilan kebijakan yang ditempuh harus selalu memperhatikan nilai-nilai demokrasi, yang terkandung di dalamnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi dan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Demikianlah penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum, maka seyogyanya hukum di Indonesia harus berperan dalam

segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

Menurut Belfroid dalam buku Achmad Ali,(2008:20), menyatakan bahwa hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat mengatur tata tertib yang didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Walaupun kehidupan kita telah dibentengi oleh hukum namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya di dalam masyarakat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Perubahan tersebut misalnya dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak lain dari ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang berakibat negatif terhadap pola tingkah laku individu, antara lain timbulnya berbagai bentuk kejahatan,

yang mengalami perkembangan seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kualitas yang semakin berat, kejam dan sadis.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar istilah perbuatan tidak menyenangkan, akan tetapi banyak diantara kita menganggap sepele istilah tersebut, padahal sesungguhnya masalah tersebut sangat besar menurut pandangan hukum.

Dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana, perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Meskipun akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban. Oleh karenanya dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap kemerdekaan orang.

Rasa tidak enak tersebut dapat berbagai macam, yaitu rasa cemas, takut, dongkol, malu, dan lain-lain rasa yang menyeruak dalam hati. Berbagai perasaan timbul bergejolak, emosi meninggi, rasa ingin membalas akan tetapi dengan berbagai kendala dan keterbatasan

membuat si penderita atau korban tidak dapat melakukan pembalasan. Kendala takut menghadapi ancaman hukuman, malu dengan masyarakat, dan keterbatasan karena lemahnya fisik, kurangnya kekuatan, membuat si penderita atau korban menahan gejolak emosinya untuk membalas seketika.

Dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Bab. XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satau tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Ke-1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke-2 : Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya di tuntutan atas pengaduan orang yang terkena.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, mengapa masalah perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut dimasukkan dalam KUHP yaitu menyangkut kemerdekaan orang, juga dapat dilihat dari nilai filsafat hukum yang terkandung didalamnya dapat di tafsirkan ialah agar jangan terjadi perbuatan yang balas membalas atau perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) antara pelaku dengan korban, hukum positif menciptakan cara membuat keseimbangan yaitu untuk menetralsir perasaan yang tidak enak tersebut, perlu campur tangan institusi penengah yaitu peradilan agar pihak yang lemah terlindungi, dan pihak yang kuat disadarkan.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam Putusan hakim Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks.

2. Kegunaan Penelitian :

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

a. Secara Akademis/Teoritis

Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Sosiologi Hukum, Hukum Pidana, dan Hukum Acara.

b. Secara Praktis

Secara praktis dapat memberikan masukan bagi para aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah menyangkut tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht Netherlands Indie* (W.v.S.N.I) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana dalam pandangan KUHP, adalah seorang manusia sebagai oknum.

Tindak pidana sering juga disebut dengan kata delik yang oleh W.J.S Poerwadarminta, (1985:45) memberikan arti delik diberi batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno dalam buku Adami Chazawi, (2008 : 71) bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

- b. Menurut Vos dalam buku Adami Chazawi, (2008 : 72) merumuskan bahwa “*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.
- c. Menurut Pompe dalam buku P.A.F Lamintang, (1990 : 174) bahwa terdapat dua macam definisi terhadap tindak pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka tindak pidana adalah pelanggaran norma, kaedah atau tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Dan dari sisi perundang-undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.

Menurut P.A.F Lamintang, (1997:192) bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi delik, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Disini berlaku “tidak pidana tanpa kesalahan” (*kiene strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Arti kata dari *Culpa* ialah “kesalahan pada umumnya”, tetapi didalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai

arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan kesengajaan atau (*opzet*) ini memang layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut P.A.F Lamintang, (1997:193-194) yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini meliputi:
 - 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
 - 2) Unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

- 3) Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Unsur ini meliputi:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
- a. Unsur formal meliputi :
- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

- 2) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

B. Pidana.

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda (*straf*), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah (2008:27), ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro (1986:1) berpendapat kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa

ditimpakan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan.

Muladi (1992:4) berkesimpulan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang;
3. Pidana itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Definisi dari Muladi, maka dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak, yang dikenakan kepada seseorang oleh yang berwenang karena telah terbukti melakukan delik.

2. Jenis-jenis Pidana.

Jenis-jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan pidana khusus. Ketentuan pidana dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

- 1) Pidana mati, merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*), yaitu berupa nyawa manusia. Pada zaman dahulu, hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dan lain-lain kejahatan yang sama beratnya dikenakan dimana-mana, berdasar atas pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar masyarakat, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan hukuman mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.
- 2) Pidana penjara, merupakan jenis pidana yang mulai berkembang sejak dihapuskannya pidana mati atau pidana badan di berbagai negara. Dengan berbagai perubahan pemikiran tentang konsep pemidanaan, maka sistem pidana penjara pun mengalami perubahan bersamaan dengan pergeseran falsafah pemidanaan dan pembalasan menuju pembinaan. Meskipun secara mendasar, pidana penjara tetap sebagai pidana yang merampas kemerdekaan. Seperti

yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang (1997 : 69) “suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

- 3) Pidana kurungan, sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap orang dewasa yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHP dan terhadap kejahatan-kejahatan yang telah diancam oleh pidana kurungan dalam Buku II KUHP. Pidana kurungan ini diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Lama

pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun.

- 4) Denda, pidana denda ialah kewajiban seseorang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh pengadilan dan hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda merupakan jenis pidana atas kekayaan (*vermogenstraf*), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana, sehingga pidana ini pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa saja.

Menurut P.A.F. Lamintang (1997 : 69) bahwa pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran.

- 5) Pidana tutupan, merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mengganti pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena didorong oleh maksud yang patut dihormati.

b. Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu adalah bersifat sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) Hak memegang jabatan angkatan bersenjata;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat (*readsmen*) atau pengurus menurut hukum (*gererchtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampuan atau pengampuan pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana terhadap harta kekayaan. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pidana perampasan terdapat dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat di rampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim, pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan

berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biasanya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Teori pembedaan dituntut untuk memperhatikan keadilan dan kejujuran atas dasar *Justice Model* di mana pembedaan diharapkan bersifat proporsional dengan beratnya tindak pidana dan derajat kesalahan si pelaku serta resiko kerugian yang di akibatkan oleh tindak pidana. Istilah pembalasan dalam tujuan pembedaan harus dihindari dan diganti dengan tujuan yang lain, yaitu pembedaan (*treatment*).

Pembinaan merupakan salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia dalam memberlakukan narapidana sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai masalah sehingga ia perlu dibina, bukan disiksa sebab penyiksaan sebagaimana sering terjadi dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti pemukulan, penembakan yang mengakibatkan korban menderita luka baik ringan maupun berat bahkan meninggal dunia. Peristiwa yang paling menonjol adalah peristiwa kerusuhan Maluku tahun 1999 sampai tahun 2002. Pada saat itu, hukum tidak berlaku bagi masyarakat maluku, yang ada

hanyalah penindasan, intimidasi, dan penyiksaan bagi yang lemah. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang kondusif ini diperlukan peningkatan kualitas dan sikap perilaku seorang penegak hukum yang mempunyai mentalitas yang baik dan keteladanan dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang terjadi dalam diri narapidana maupun masyarakat terutama di daerah konflik.

3. Teori Tujuan Pidanaan.

Menurut Teguh Prasetyo, (2010:15) bahwa teori tujuan pidana dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidana yaitu:

1) Teori Retributif (Absolut).

Teori ini dianggap teori tertua dalam teori tujuan pidana. Teori Retributif memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri. Teori ini mencari dasar pidana dengan memandang masa lampau (melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku). Menurut teori ini pidana diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya sehingga pidana menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang

telah diakibatkan. Oleh karena itu teori ini dibenarkan secara moral.

Menurut Johannes Andenaes dalam buku Ninik Suparni, (2007:16) bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Selanjutnya menurut Immanuel Kant dalam buku Ninik Suparni, (2007:16) bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pembedaan sebagai kategorische imperative, yakni seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid)

2) Teori Relatif (Tujuan).

Teori Relatif memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini muncullah tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku, maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori ini bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada

orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu memiliki tujuan yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Teori Relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu:

- 1) Tujuan *Preventif*, pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat.
- 2) Tujuan *Deterrence* (menakuti), adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi dalam tiga yaitu:
 - a. Tujuan yang bersifat individual yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali.
 - b. Tujuan Yang bersifat Publik yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan.
 - c. Tujuan jangka panjang yaitu agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana.
- 3) Tujuan *Reformatif* (Perubahan), adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

3) Teori Integratif (Gabungan).

Pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah. Karakter relatif terletak pada tujuan kritik moral tersebut, yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku si terpidana dikemudian hari. Dengan demikian dalam konsep gabungan ini, teori integratif menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan, tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.

Tujuan pemidanaan yang paling primitif adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan. Tujuan lain yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi sebagai pelepasan pelanggaran hukuman dari perbuatan jahat atau menyeimbangkan antara yang baik dan yang bathil. Beberapa bentuk pidana pada masa lalu seperti pengasingan, rajam, pembakaran hidup-hidup adalah bentuk yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengganggu masyarakat lagi di masa mendatang atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jenis pidana seperti potong tangan bagi pencuri mempunyai tujuan lain yaitu untuk menakut-nakuti masyarakat yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Jadi ada dua

tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan di masa lalu, yaitu pelaku tidak bisa mengulangi kejahatannya di masa mendatang dan mencegah terjadinya kejahatan baru yang serupa.

Pada perkembangan selanjutnya, tujuan pidana dicurahkan pada hal yang sifatnya rasional dan manusiawi. Perkembangan tujuan pidana mulai dikemukakan oleh pemikir-pemikir pada masa romawi. Tidak ada orang yang bijaksana menghukum pidana karena orang tersebut telah membuat kejahatan akan tetapi pidana dilakukan dengan tujuan supaya orang tersebut tidak mengulangi kejahatan.

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Oleh karena itu maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi, sebab di dalam kriminologi itulah akan diteliti sebab-sebab seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu, juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu psikologi.

C. Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ini diatur dalam Pasal 335 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Ke-1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke-2 : Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Perbuatan tidak menyenangkan sesungguhnya merupakan masalah yang sangat besar menurut pandangan hukum, terbukti diatur dalam Bab yang penting dalam KUHP yaitu Bab XVIII, Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Secara harfiah jika di tafsirkan tata letak bab pengaturannya dalam KUHP ini, maka bermakna bahwa

“kemerdekaan” adalah lebih penting dari pada “nyawa”, apa gunanya nyawa jika kita tidak punya kemerdekaan, atau tidak punya kebebasan.

Dalam Pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, bukan suatu akibat dari perbuatan tersangka/terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Perbuatan itu ditujukan kepada orang secara langsung, bukan terhadap barang atau benda.

Perbuatan tidak menyenangkan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban atau si penderita atau korban mengalami sakit hati (perasaan). Dengan demikian berarti dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan merupakan ancaman terhadap kemerdekaan orang perorang. Oleh karena itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap “kemerdekaan orang”.

Mengacu pada Pasal 335 KHUP, maka unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur Melawan Hukum.

Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan yang sifatnya menentang, memaksa dan menekan seseorang yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan ini bersifat abstrak, yang wujudnya akan lebih nyata bila dihubungkan dengan cara melakukannya, yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif, hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada dasarnya menyebutkan bahwa "suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis.

Melawan hukum singkatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

2. Unsur Memaksa Orang Lain.

Mendesak atau menekan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan orang itu, dengan menggunakan kekerasan dan mengancam orang tersebut. Misalnya, seorang pasien memaksa dokter untuk meresepkan obat penenang dengan ancaman akan dibunuh bila tidak melakukannya.

Menurut R. Soesilo, (1993:245) menyatakan bahwa Memaksa orang lain, dimana yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

3. Unsur Kekerasan.

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Melakukan kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Menurut R. Soesilo, (1993 : 246) bahwa “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Dengan perbuatan lain, maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

4. Unsur Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban atau si penderita atau korban mengalami sakit hati (perasaan).

Sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan merupakan ancaman terhadap kemerdekaan orang perorang. Oleh karena itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap “kemerdekaan orang”.

Perbuatan tidak menyenangkan sesungguhnya merupakan masalah yang sangat besar menurut pandangan hukum, terbukti diatur dalam Bab yang penting dalam KUHP yaitu Bab XVIII, Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Secara harfiah jika di tafsirkan tata letak bab pengaturannya dalam KUHP ini, maka bermakna bahwa “kemerdekaan” adalah lebih penting dari pada

“nyawa”, apa gunanya nyawa jika kita tidak punya kemerdekaan, atau tidak punya kebebasan.

Dalam Pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, bukan suatu akibat dari perbuatan tersangka/terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Perbuatan itu ditujukan kepada orang secara langsung, bukan terhadap barang atau benda.

Dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

Dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu”. Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena

dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Kita mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain member keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.

a. Yang meringankan

Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang menurut Leden Marpaung, (2005: 113) adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”

- 2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”
- 3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

b. Yang memberatkan

Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP :

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh

lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

4) Dan Pasal 66 KUHP yang berbunyi:

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”

5) Dalam hal Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

B. Jenis dan Sumber Data.

Untuk mendapat data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet serta data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian Lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi yang berupa hasil wawancara dengan beberapa hakim yang menangani kasus yang penulis teliti.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

D. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh, baik data sekunder dan primer, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang ketentuan Pasal 335 KUHP dan penerapannya dalam putusan hakim Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks. Kemudian, dideskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Putusan Hakim Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Putusan Hakim Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks. maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Posisi Kasus.

Yossy Tungawan, pelaku pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WITA telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, bertempat di jalan Gunung Lokon No.70 Kota Makassar.

Pada Awalnya, saksi korban hendak masuk kedalam lokasi milik saksi korban yang terletak di jalan Gunung Lokon No. 70 Kota Makassar namun pintu yang saksi korban buat ditutup oleh terdakwa pada hari Selasa 15 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WITA dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi pada tanggal 03 Mei 2012 dari

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan diatas lokasi tersebut dibagi dua, jadi tanah dan bangunan seperdua milik saksi korban dan seperdua milik terdakwa, namun ketika saksi korban hendak masuk ke dalam lokasi yang menjadi miliknya pintu dan atau akses untuk masuk ke dalam lokasi tersebut ditutup oleh terdakwa dan terdakwa melarang saksi korban untuk membuka tembok tersebut dan melakukan pengancaman sambil berkata “Kalau Kamu Tetap Suruh Orang Bobol ini Tembok Saya Habisi Kamu” sambil menunjuk kearah saksi korban yang mana jarak antara terdakwa dan saksi korban 45 cm.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Perbuatan terdakwa tersebut diaturam pidana Pasal 335 (1) ke-1KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh barang bukti, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 335 (1) ke-1KUHP. Oleh Karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Yossy Tungawan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke-1KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Putusan Hakim.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 (1) ke-1 KUHPidana serta segala ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

- Menyatakan terdakwa YOSSY Tungawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tidak menyenangkan”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selam 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani pembayaran biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Analisis Penulis

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, hal ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam

persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi yang sesuai dan ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya dan telah mencakup rumusan delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang sesuai dengan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa,
- b. Unsur Melawan Hukum,
- c. Unsur Ancaman Kekerasan,
- d. Unsur Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan.

a. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Dalam persidangan terdakwa Yossy Tungawan telah diajukan oleh penuntut umum dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana didalam surat dakwaan, berdasarkan fakta yang

terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang sifatnya menentang, memaksa dan menekan seseorang yang bertentangan dengan hukum, perbuatan ini bersifat abstrak, yang wujudnya lebih nyata bila dihubungkan dengan cara melakukannya, yakni dengan kekerasan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban Wiliam dan saksi-saksi lainnya dan didukung dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 pukul 10.00 WITA di Jalan Gunung Lokon No.70 Kota Makassar, terdakwa Yossy Tungawan telah mengancam dan menghalangi saksi korban ketika akan membongkar pintu pagar yang menjadi bagian atas lokasi tanah yang telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar dan ketika saksi korban meninggalkan lokasi tanah itu pintu yang telah saksi korban buat ditutup kembali oleh terdakwa dengan menggunakan batu batako

tanpa sepengetahuan saksi korban dan mengancam saksi korban dengan berkata berkata “Kalau Kamu Tetap Suruh Orang Bobol Ini Tembok Saya Habisi Kamu” sambil menunjuk kearah saksi korban yang mana jarak antara terdakwa dan saksi korban 45 cm.

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur Ancaman Kekerasan.

Yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengancam korban dengan mengeluarkan kata berupa “Kalau Kamu Tetap Suruh Orang Bobol Ini Tembok Saya Habisi Kamu” sambil menunjuk kearah saksi korban yang mana jarak antara terdakwa dan saksi korban 45 cm. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan

Yang dimaksud dengan “Perbuatan Tidak Menyenangkan” adalah perbuatan yang dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika

perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah mengancam dan menghalangi saksi korban ketika akan membongkar pintu pagar yang menjadi bagian atas lokasi tanah yang telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar dan ketika saksi korban meninggalkan lokasi tanah itu pintu yang telah saksi korban buat ditutup kembali oleh terdakwa dengan menggunakan batu batako tanpa sepengetahuan saksi korban dan mengancam saksi korban dengan berkata berkata “Kalau Kamu Tetap Suruh Orang Bobol Ini Tembok Saya Habisi Kamu” sambil menunjuk kearah saksi korban yang mana jarak antara terdakwa dan saksi korban 45 cm. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa Yossy Tungawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hakim kemudian sependapat dengan tuntutan jaksa dengan menyatakan terdakwa bersalah dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Berkaitan dengan masalah di atas, Penulis telah melakukan wawancara dengan Maxi Sigarlaki, S.H M.H (hakim Pengadilan Negeri Makassar) pada tanggal 31 Mei 2012 menyatakan bahwa :

Unsur-unsur perbuatan tidak menyenangkan berdasarkan Pasal 335 Ayat (1)ke-1KUHP, telah sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Yossy Tungawan, maka terdakwa Yossy Tungawan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dilihat dari segi tanggungjawab pidananya, maka pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap terdakwa yang berhubungan dengan kelakuannya, serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi sipembuat, dengan adanya hal tersebut, maka unsur bertanggungjawab dapat dipenuhi. Oleh karena itu, kepada terdakwa adalah wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memaafkan atau membenarkan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam perkara ini

sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Putusan Nomor 1338/Pid.B/2011/PN.Mks.

1. Keterangan Saksi-Saksi

Dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti sebagai berikut :

1) Saksi William

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Gunung Lokon No.70 Kota Makassar telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa Yossy Tungawan;
- Bahwa benar cara dari terdakwa melakukan tindak pidana adalah dengan menutup pintu dengan batu batako yang telah saksi korban buat untuk saksi korban pakai masuk ke lokasi tanah milik orang tua saksi Sdr. Jan Laurin yang telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar sehingga saksi korban tidak dapat masuk ke lokasi tanah saksi korban sendiri;
- Bahwa benar lokasi tanah itu telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dimenangkan oleh orang tua saksi korban Sdr. Jan Laurin.
- Bahwa dengan telah ditutupnya lokasi tanah itu telah menghalangi saksi untuk masuk ke lokasi tanah orang tua saya dan telah membuat perasaan saya tidak tenang;
- Bahwa benar ada lagi perbuatan Yossy Tungawan yang telah dilakukan terhadap saksi yaitu melarang saksi untuk membuka tembok untuk saksi buat pintu masuk ke lokasi tanah milik saksi yang telah di eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Makassar dengan cara meneluarkan kata-kata “Kalau Kamu Tetap Suruh Orang Bobol Ini Tembok Saya Habisi Kamu” sambil menunjuk kearah saksi korban yang mana jarak antara terdakwa dan saksi korban 45 cm, sehingga orang yang saksi susruh untuk membuka atau

membobol tembok saat itu juga berhenti, namun selanjutnya dapat dibuka kembali tembok itu setelah adanya peringatan dari pihak Kepolisian itupun nanti dibuka sekitar 10 menit berikutnya;

- Bahwa benar masih ada lagi perbuatan yang dilakukan oleh saudara Yossy Tungawan setelah mengeluarkan kata-kata berupa “KALAU BEGITU KAMU MAU LAWAN SAYA DIK SAYA TELPON SEKARANG” sambil pergi dan menelpon seseorang yang saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi merasa telah terancam dan terusik serta telah mengganggu kegiatan saya untuk membuka atau membobol tembok untuk saksi buat pintu masuk ke lokasi tanah milik saksi dan seandainya saat itu tidak ada petugas Kepolisian maka saksi bersama dengan tukang yang saya suruh tidak dapat membuka tembok dan membobol karena telah dihalangi oleh Yossy dan istrinya;
- Bahwa orang yang saksi suruh saat itu adalah saudara Rahman serta saudara Dg Tawa dan temannya yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.

2) Saksi Jan Laurin.

- Didepan persidangan keterangannya dibacakan sesuai BAP dari penyidik dan keterangannya dibenarkan oleh terdakwa

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan.

1. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-23/Mks/Ep/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yaitu melanggar sebagaimana dalam dakwaan Pasal 335 Ayat(1) ke-1 KUHP ;

2. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa diwakili penasihat hukumnya menyatakan mengajukan eksepsi;
3. Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : Wiliam dan Jan Laurin sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;
4. Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;
5. Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara juga dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;
6. Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
7. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

8. Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
9. Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa agar putusan ini dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dapat memberi efek jera dan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang tidak menyenangkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
10. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

2. Putusan Hakim

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan Perundang-Undangan lainnya, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

- Menyatakan terdakwa YOSSY Tungawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tidak menyenangkan”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selam 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani pembayaran biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Analisis Penulis.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di indonesia.

Secara yuridis, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang didasarkan pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks dinyatakan bahwa putusan didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk.PDM-23/Mks/Ep/12/2012 tanggal 18 Desember 2012. Selanjutnya pada persidangan dihadapkan seorang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah (saksi Wiliam dan Jan Laurin), serta keterangan terdakwa yang juga membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut.

Menurut Penulis putusan Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks. dengan terdakwa Yossy Tungawan telah sesuai dengan terpenuhinya Pasal 197 KUHP.

Pasal 197 KUHP mengatur sebagai berikut :

1. Surat Putusan Pidana Memuat :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
 - b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
 - c) Dakwaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.
 - d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
 - e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
 - f) Pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 - g) Hari dan tanggal diselenggarakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang di periksa hakim tunggal.
 - h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
 - i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
 - j) Keterangan kepada seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
 - k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam penahanan atau dibebaskan.
 - l) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.
2. Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a,b,c,d,f,g,h,i,k, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum.
 3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini, putusan pengadilan harus didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 dan Pasal 185 KUHAP
Pasal 183 KUHAP mengatur sebagai berikut :
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah yang ia peroleh bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 185 KUHAP mengatur sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian suatu keadaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan kebenaran adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
 - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Bertolak dari hal tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menurut Pasal 185 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut juga saling berkesesuaian sehingga hakim kemudian

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP benar-benar terjadi dan terdakwa yang dipersalahkan melakukannya. Pertimbangan Hakim angka 5 Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mks. dengan demikian, ketentuan Pasal 183 KUHP telah terpenuhi.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Mks. menyatakan bahwa terdakwa Yossy Tungawan telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke 1 yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan tidak menyenangkan secara melawan hukum dan memaksa orang lain. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa relatif ringan. Menurut penulis seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat sekitar tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Mks. padahal tujuan utama dari penjatuhan hukum adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga masyarakat sekitar tidak berani lagi melakukan perbuatan yang sama dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat berat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semua unsur perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa Yossy Tungawan telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 335 KUHP. Hal ini terlihat dari terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut sesuai dengan pasal yang didakwakan pada terdakwa. Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan melihat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan membayar biaya perkara.
2. Dalam memutuskan perkara Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempunyai pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Sehingga terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) bulan dan membayar biaya perkara, tidak sepenuhnya mengandung

kemanfaatan hukum. Mengingat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Yosy Tungawan, maka menurut penulis, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai sangat ringan.

B. Saran

Adapun saran yang Penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Pihak penuntut umum dan majelis hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan harus lebih teliti dalam hal memeriksa perkara sehingga dapat mengurai dengan tegas unsur-unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, sehingga dapat dengan mudah menjerat pelaku tindak pidana tersebut, dan lebih jeli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, serta harus memperhatikan adanya kesalahan yang dilakukan, kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi terdakwa dalam menerapkan pasal 335 KUHP ayat (1) ke 1 dan lebih teliti, karena berhubungan erat dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang lainnya.

2. Putusan yang ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa saja membuat pelaku tidak merasakan efek jerah dan dapat sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu disini diperlukan keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, maupun bagi hakim agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 2008 Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Adami Chazawi,. 2008 Hukum Pidana Bagian I. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Abidin Zainal Farid. 2007 Asas-asas Hukum Pidana Bagian I. Alumni: Bandung.
- Andi Hamzah,. 1993 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- _____. 2008 Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005 Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.ta.
- Moeljatno. 2002 Asas-asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- M. Sholehuddin,. 2003 Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Muladi. 1992 Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni: Bandung.
- P.A.F Lamintang,. 1997 Dasar-Dasar Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 1990 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru: Bandung.

R. Soesilo,. 1993 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Politeia: Bogor.

Sudarto. 1990 Hukum Pidana 1. Yayasan Sudarto Undip: Semarang.

Teguh Prasetyo,. 2010 Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada:
Jakarta

Wirjono Prodjodikoro,. 1986 Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia. PT.
Eresco: Bandung.

W.J.S Poerwadarminta,. 1985 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka:
Jakarta.

[http://minsatu.blogspot.com/2011/08/perbuatan-tidak-menyenangkan
pasal-335.html](http://minsatu.blogspot.com/2011/08/perbuatan-tidak-menyenangkan-pasal-335.html)

<http://www.duniakontraktor.com/penerapan-pasal-335-kuhp/.html>

<http://www.tanyahukum.com/pidana/211/perbuatan-tidak-menyenangkan/>

<http://hasansodikin.blogspot.com/2013/03/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

[http://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/pertimbangan-hakim-dalam-
menjatuhkan.html](http://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html)